

# LAPORAN TAHUNAN 2011



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



**ACCOUNTABILITY**

**TRANSPARENCY**



**KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**LAPORANTAHUNAN**

**2011**

**ACCOUNTABILITY**

**TRANSPARENCY**

**SAMBUTAN  
KETUA KOMITE KONSULTATIF  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



**K**omite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Tahun 2011 ini merupakan tahun kedua berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan peraturan pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 diatur mengenai SAP Berbasis Akrua (Lampiran I) maupun SAP Berbasis Kas Menuju Akrua (Lampiran II), hal ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk persiapan secara bertahap penerapan SAP Berbasis Akrua yang paling lambat diterapkan untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.

Pada tahun 2011, KSAP juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrua (*cash towards accrual*), seperti penyusunan Buletin Teknis berserta sosialisasinya kepada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2011 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan KSAP 2011, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya Presiden RI melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja KSAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2011 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Februari 2012

Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Selaku Ketua Komite Konsultatif,

Agus Suprijanto

**PENGANTAR  
KETUA KOMITE KERJA  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Laporan Tahunan 2011 ini disusun sebagai media transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2011.

KSAP terus berupaya mendorong implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui sosialisasi, lokakarya (*workshop*), *Training of Trainers* (TOT), pelayanan publik, *help desk*, serta penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan SAP.

Selama tahun 2011, KSAP telah melaksanakan tugas untuk ikut mendorong implementasi SAP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terutama dalam memberikan konsultasi terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan dalam implementasi SAP baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Tahun 2011 ini, KSAP juga telah mengikuti sejumlah agenda internasional antara lain kunjungan ke Brussel dan Hanoi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, Laporan Tahunan 2011 ini juga telah memuat informasi keuangan KSAP tahun 2011.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan agar dalam pelaksanaan kegiatan KSAP pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, Februari 2012  
Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

## DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif .....	1
Pengantar Ketua Komite Kerja.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab I    Pendahuluan.....	4
A.Organisasi dan Kedudukan KSAP .....	4
B.Tugas Pokok KSAP .....	6
Bab II    Rencana Kerja KSAP .....	8
A.Kondisi Umum .....	8
B.Rencana Strategis.....	9
Bab III    Kinerja KSAP .....	14
A.Capaian Kinerja.....	14
B.Pelaksanaan Kegiatan .....	15
C.Aspek Keuangan.....	20
D.Kendala dan Strategi Pemecahannya.....	20
Bab IV    Rencana Kerja Tahun 2012 .....	21
Bab V    Penutup.....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 3 tahun 2009.



*Komite Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan komite independen yang bertugas untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*

### ***A. Organisasi dan Kedudukan KSAP***

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2009 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses penyusunan (*due process*) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2009 adalah:

### ***Komite Konsultatif:***

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai Anggota;
4. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
5. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA sebagai Anggota; dan
6. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa sebagai Anggota.

### ***Komite Kerja:***

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. AB Trihartarta, Ak., MM sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM sebagai Anggota;\*
5. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM sebagai Anggota;\*
6. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota;
7. Yuniar Yanuar, Ak., MM sebagai Anggota;
8. Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA sebagai Anggota; dan\*
9. Dr. Dwi Martani, SE, Ak. sebagai Anggota;

(\*) Anggota dimaksud sudah tidak aktif sebagai anggota Komja

- Drs. Sugijanto, Ak., MM : Mengundurkan diri karena kesibukan lain
- Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM : Bertugas di World Bank
- Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA : Bertugas di BPK



*Anggota Komite Kerja KSAP :  
(ki-ka) Jan Hoesada, Dwi Martani, AB. Trihartarta, Binsar H. Simanjuntak,  
Sonny Loho, Yuniar Yanuar Rasyid.,*

## **B. Tugas Pokok KSAP**

Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2009, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres Nomor 3 Tahun 2009, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP untuk perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja periode tahun 2011 terakhir kali dibentuk dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 1 Februari 2011 dengan KEP-04/K.1/KSAP/II/2011 beranggotakan 30 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS, Ketua;
2. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Wakil Ketua;
3. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
4. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
5. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota;
6. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
7. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
8. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
9. Hasanuddin, Ak., M.Ak., Anggota;
10. Syaiful, SE, Ak., MM, Anggota;
11. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;
12. R. Wiwin Istanti, SE, Ak., M.LAWS., Anggota;
13. Mhd. Syahman Sitompul, SE, Ak., M.Si., Anggota;
14. Heru Novandi, SE, Ak., Anggota;
15. Muliani Sulya F., SE, Anggota.
16. Zulfikar Aragani, SE., Anggota
17. Izharul Haq, SE, M.Fin., Anggota;
18. Tio Novita Efriani, SE, Ak., MGPP, Anggota;
19. Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM, Anggota;
20. Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc, Anggota.
21. Hari Sugiyanto, Ak. MSc., Anggota;
22. R. Yongki Andrea A., SE, Anggota;
23. Mega Meilistya, SE, Ak., MBA, Anggota;
24. Iskandar Novianto, Ak., M.Si., Anggota;



25. Akhdian Reppawali, Ak., M.Buss., Anggota;
26. Lucia Widiharsanti, SE, M.Si., CFE, Anggota;
27. Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, Anggota;
28. Ayu Novita Wulandari, SE, Ak., Anggota;
29. Ketut Arya Udayana, SE. Ak., MT., Anggota; dan
30. Mauritz CRM, SST., Ak., Anggota.

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 547/KMK.06/2004 tentang Sekretariat KSAP dan sebagaimana terakhir telah diubah dengan KMK Nomor 03/KM.5/2011, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Hari Sugiyanto, Ak. MSc, Ketua;
2. Izharul Haq, SE, M.Fin, Wakil Ketua;
3. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;
4. Mega Meilistya, SE, Ak., MBA, Anggota;
5. Tio Novita Efriani, SE, Ak., MGPP., Anggota;
6. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
7. Andri Fuadhy, SE, Anggota;
8. Zulfikar Aragani, Anggota; dan
9. R. Yongki Andrea A., SE, Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.



*Komite Kerja, Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP*

## BAB II

# RENCANA KERJA KSAP



*Komite Kerja, Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP*

### A. Kondisi Umum

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Begitu pula Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk memenuhi amanat UU, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). SAP dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut

merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

Terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia.

Sebagai langkah awal untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual dan telah ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Lingkup dari PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara SAP berbasis kas menuju akrual terdapat pada Lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual dengan batas waktu masa transisi Tahun Anggaran 2014.

Penyusunan Rencana Strategis KSAP tahun 2011 – 2015 disesuaikan dengan rencana pentahapan implementasi akuntansi berbasis akrual yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2011 dan 2012, tantangan dari KSAP adalah penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP merupakan penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana tertuang pada PP SAP. Sedangkan Buletin Teknis berisi informasi dan penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

Tugas berikutnya dari KSAP pada periode 2013 – 2015 adalah membantu implementasi SAP pada unit-unit instansi pemerintah, sejalan dengan program uji coba implementasi akuntansi akrual pada tahun 2013, implementasi akuntansi akrual secara paralel pada tahun 2014, serta implementasi akuntansi akrual penuh pada tahun 2015.

## ***B. Rencana Strategis***

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

### ***Visi :***

*"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas."*

**Misi :**

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

**Tujuan:**

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Rencana kerja tersebut telah disesuaikan berdasarkan perkembangan yang terjadi selama tahun 2011.

**Tabel 1: Rencana Strategis Tahun 2010 s.d. Tahun 2014**

<b>A. Tahun 2010</b>	
1.	Penyusunan SAP Berbasis Akruwal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalisasi SAP Berbasis Akruwal</li> <li>2. Pembahasan dengan Sekretariat Negara untuk penerbitan PP SAP</li> <li>3. Penerbitan PP SAP Berbasis Akruwal</li> </ol>
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP CTA               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Aset Tetap</li> <li>• Buletin Teknis Bantuan Sosial</li> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Aset Tak Berwujud</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> </ul> </li> <li>2. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP Akruwal               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> </ul> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis PNB</li> </ul>
			3. Penerbitan buletin teknis SAP CTA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Aset Tetap</li> </ul>
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>3. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>4. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>5. Pelayanan Publik</li> </ol>
4.	International Events		Pertemuan <i>Governmental Accounting Standards Setters of ASEAN Member Countries</i>
<b>B. Tahun 2011</b>			
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua		Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO
2.	Penyusunan <i>Buletin Teknis SAP</i>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Bantuan Sosial</li> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Aset Tak Berwujud</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Negara Bukan Pajak</li> <li>• Buletin Teknis Akuntansi Penerusan Pinjaman</li> </ul> </li> </ol>
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>3. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>4. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>5. Pelayanan Publik</li> </ol>
<b>C. Tahun 2012</b>			
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO</li> <li>• Pengembangan SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>
2.	Penyusunan <i>Buletin Teknis SAP</i>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan buletin teknis SAP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Negara Bukan Pajak</li> <li>• Akrualisasi Bultek CTA</li> </ul> </li> </ol>
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i></li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>4. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>5. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> </ol>
<b>D. Tahun 2013</b>		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	Pengembangan SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
2.	<i>Penyusunan Buletin Teknis SAP</i>	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i></li> <li>3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>4. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>5. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> </ol>
<b>E. Tahun 2014</b>		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	Pengembangan SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
2.	<i>Penyusunan Buletin Teknis SAP</i>	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i></li> <li>3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>4. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>5. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> </ol>

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2011 adalah sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005, maka dipandang penting untuk melakukan sosialisasi SAP tersebut. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi SAP.

### **2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pada tahun 2011 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrua (PP Nomor 24 Tahun 2005 yang telah dicabut dengan PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para *stakeholders*. Buletin teknis ini disusun

untuk memberikan arahan/pedoman penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.

### **3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan**

#### **a. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

#### **b. Workshop Buletin Teknis SAP**

SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Untuk itu, pada tahun 2011, KSAP akan mengadakan *workshop* mengenai buletin teknis yang telah diterbitkan. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2011.

#### **b. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP**

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akruar, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

#### **c. Pemeliharaan Website KSAP**

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

#### **d. Penyelenggaraan Help Desk**

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

#### **e. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

## BAB III

# KINERJA KSAP



*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Kas Menuju Akrual)*

### A. Capaian Kinerja

Tahun 2011 merupakan masa yang penting bagi perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, karena setelah pada tahun 2010 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai SAP Berbasis Akrual telah diterbitkan, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, sehingga tahun 2011 merupakan periode untuk mensosialisasikan peraturan tersebut. Selain sosialisasi SAP Berbasis Akrual, sampai dengan akhir tahun 2011, KSAP telah menetapkan 2 (dua) Buletin Teknis yaitu Buletin Teknis No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial dan Buletin Teknis No. 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Ringkasan capaian kinerja KSAP pada tahun 2011 adalah:

- Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Buletin Teknis Akuntansi Belanja Bantuan Sosial pada tanggal 12, 19 dan 28 Juli 2011;
- Penetapan Buletin Teknis SAP No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial dan Buletin Teknis No. 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
- Penyusunan 1 (satu) draf Pernyataan Standar, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pendapatan-LO;
- Penyusunan 5 (lima) draf buletin teknis, yaitu Buletin Teknis tentang Akuntansi Selisih Kurs, Buletin Teknis tentang Akuntansi Hibah, Buletin Teknis tentang Akuntansi Kas, Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak.



- Pengembangan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri;
- Sosialisasi SAP pada beberapa Pemda dan Perguruan Tinggi; dan
- Pelayanan Publik menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan akuntansi pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## ***B. Pelaksanaan Kegiatan***

### ***1. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan***

Dalam tahun 2011, KSAP telah menetapkan 2 (dua) buah buletin teknis yaitu Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial dan Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2011, KSAP telah menerbitkan 11 (sebelas) buletin teknis dan 1 (satu) Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP), yaitu:

1. Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat;
2. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
3. Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi;
4. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja;
5. Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
6. Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang;
7. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
8. Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang;
9. Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
10. Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
11. Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud
12. IPSAP Nomor 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

*Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial merupakan Bultek SAP yang terbit tahun 2011 yang bertujuan sebagai petunjuk teknis Pernyataan Standar Akuntansi tentang Belanja Bantuan Sosial*



Disamping itu, terdapat beberapa buletin teknis yang dikembangkan dan hingga akhir tahun 2011 sedang dalam proses pembahasan. Beberapa draf buletin teknis SAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buletin Teknis tentang Hibah;
2. Buletin Teknis tentang Akuntansi Selisih Kurs;
3. Buletin Teknis tentang Akuntansi Kas;

4. Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak; dan
6. Buletin Teknis tentang Penerusan Pinjaman;  
Khusus untuk Bultek tentang Penerusan Pinjaman penyusunannya dihentikan karena lingkup pembahasannya dinilai terlalu sempit dan sudah ada aturan pemerintah yang telah mengatur hal tersebut.

## ***2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan***

### **Kegiatan 1: Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial**

Pada tahun 2011 ini, KSAP telah menyelenggarakan Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Sosialisasi tersebut diadakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Jakarta (12 Juli 2011), Medan (19 Juli 2011), dan Denpasar (28 Juli 2011).

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi atas Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang telah tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai peraturan pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan juga mensosialisasikan Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.

Sosialisasi ini dihadiri oleh kalangan akademisi, Perwakilan BPK, Perwakilan BPKP, para praktisi baik dari lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun inspektorat di pemerintah daerah, serta dari kementerian lembaga/negara yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah serta pihak lain yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.



*Sosialisasi SAP dan Bultek SAP yang diselenggarakan di Jakarta 12 Juli 2011*

### Kegiatan 2: Limited Hearing

Tahun 2011, KSAP menyelenggarakan 2 kegiatan *limited hearing* yaitu *Limited Hearing* Bultek Akuntansi Aset Tidak Berwujud dan *Limited Hearing* PSAP Pendapatan - LO

*Limited hearing* pertama tentang Bultek Akuntansi Aset Tidak Berwujud diselenggarakan dengan tujuan untuk menyampaikan pokok-pokok substansi Buletin Teknis Akuntansi Aset Tidak Berwujud serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait. Acara ini diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan mengundang Auditor Utama Keuangan BPK, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Pemerintah Daerah, Baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

*Limited hearing* PSAP Pendapatan – LO diselenggarakan pada tanggal 16 November 2011 di Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok substansi draf PSAP Pendapatan – LO serta menggali masukan dari pihak-pihak kompeten terbatas yang terdiri dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

### Kegiatan 3: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain:

- *Public Sector Accounting Conference* tanggal 19 Mei 2011, dilanjutkan dengan *Roundtable Discussion-Conference on Improving Public Sector Financial Management* tanggal 20 Mei 2011. Kegiatan ini diselenggarakan di Seoul Korea Selatan,
- *The 5<sup>th</sup> IFRS Regional Policy Forum & International Seminar*, diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 23-26 Mei 2011,
- *Harmonizing Accounting and Auditing in The Public Sector* yang diselenggarakan di Brussels Belgia tanggal 1 Juli 2011,
- *Seminar on International Public Accounting Standards System and Application Roadmap*, diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 14-17 Desember 2011.



Duta KSAP bersama Wakil Pemerintah Korea Selatan  
pada studi banding praktik Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua

### Kegiatan 4: Pemeliharaan *Website* KSAP

Dalam rangka memberi informasi mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun *Website* KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan *Website* ditujukan untuk mengekspose PSAP dan Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung *website*.

Pada *website* tersebut juga tersedia email para anggota KSAP.



*Tampilan muka Website KSAP :  
www.ksap.org  
sebagai media sosialisasi KSAP yang  
menjembatani KSAP dengan Stakeholder  
KSAP*

### Kegiatan 5: Penyelenggaraan *Help Desk*

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *helpdesk* yang terdiri dari beberapa anggota Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya.

### Kegiatan 6: Pelayanan Publik

Pada tahun 2011, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP. Selain itu, KSAP juga membantu memberikan konsultasi teknis atas implementasi SAP kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu:

1. Metode penilaian investasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
2. Perlakuan akuntansi sisa Uang Persediaan (UP) pada akhir periode dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
3. Perlakuan akuntansi aset tetap di bawah batas nilai kapitalisasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
4. Pencatatan dan pelaporan penerimaan deviden BUMN dan perseroan terbatas lainnya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara- Kementerian Keuangan;

5. Perlakuan akuntansi terhadap pembayaran jual beli tanah dan bangunan, serta kebijakan status kepemilikan tanggul yang dibangun di atas tapak tanggul yang bukan merupakan BMN dari Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
6. Perlakuan akuntansi untuk penerimaan aset, baik yang diterima dari Perjanjian Kerja sama (PKS), Hibah, Fasos Fasum dan Penerimaan lainnya dari Pemerintah Provinsi DKI;
7. Penjelasan lebih lanjut atas pencatatan investasi dengan metode ekuitas dari Pemkot Bandung;
8. Perlakuan akuntansi atas Outstanding SP2D dari Pemprov Nusa Tenggara Barat;
9. Klarifikasi KSAP atas rancangan Permendagri terkait dengan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal pemerintah daerah, obyek investasi non permanen dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat dari Kementerian Dalam Negeri;
10. Perlakuan akuntansi atas jenis belanja untuk perpanjangan lisensi software dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
11. Penyajian dan pengelolaan dana jamkesmas dan penyajian investasi jangka pendek dari Pemkot Cilegon;
12. Perlakuan akuntansi atas belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dari BP-BPLS;
13. Perlakuan akuntansi atas biaya pemeliharaan 5 % ditahan dari nilai aset tetap dari Pemprov Nusa Tenggara barat;
14. Perlakuan akuntansi atas Dana Penguatan Modal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Permasalahan kebijakan akuntansi, pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Pemprov Kalimantan Barat;
16. Perlakuan akuntansi atas Subsequent Expenditure atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
17. Perlakuan akuntansi atas belanja untuk bantuan pemerintah dari Kementerian Sekretariat Negara;
18. Perlakuan akuntansi atas transaksi pembelian surat berharga negara dalam rangka stabilisasi SBN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
19. Perlakuan akuntansi atas bantuan perkuatan bagi usaha mikro dan kecil dari kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
20. Perlakuan akuntansi atas aset lainnya dan aset tak berwujud dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

### C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2011, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp3.896.140.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSAP – Kementerian Keuangan. Dari anggaran tersebut, KSAP telah merealisasikan sebesar Rp3.800.505.106 atau 97,55% dari pagu anggaran.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2011:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	Rp3.896.140.000	Rp3.800.505.106	97,55%
53	Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp3.896.140.000</b>	<b>Rp3.800.505.106</b>	<b>97,55%</b>

Laporan Keuangan KSAP Tahun 2011, selaku satuan kerja, secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

### D. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Pada tahun 2011, terdapat beberapa buletin teknis yang direncanakan dapat diselesaikan dan diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2011 tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan prioritas KSAP pada tahun 2011 adalah masih diperlukannya kajian yang lebih mendalam agar buletin teknis tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, selama tahun 2011, KSAP juga banyak menerima pertanyaan/konsultasi dari berbagai unit instansi baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait permasalahan implementasi SAP yang harus dibahas secara hati-hati dan memerlukan waktu pembahasan yang cukup panjang. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KSAP telah membentuk tim-tim kecil yang bertugas mengkaji dan menjawab atas pertanyaan/konsultasi dari berbagai instansi pemerintah.

## BAB IV

# RENCANA KERJA TAHUN 2012

Untuk mendukung implementasi SAP dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2012 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Penyusunan PSAP

Pada tahun 2012, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual, yaitu Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional (LO) dan menyusun PSAP Akuntansi beban. PSAP ini akan melengkapi PSAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

### 2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2012, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan/penerbitan buletin teknis SAP baik SAP Berbasis Kas Menuju Akrual maupun SAP Berbasis Akrual. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dalam menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

Buletin teknis SAP Berbasis Akrual yang akan disusun adalah:

- 1). Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Pajak
- 2). Buletin Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 3). Buletin Teknis Akuntansi Piutang
- 4). Buletin Teknis Akuntansi Utang
- 5). Buletin Teknis Selisih Kurs/Transaksi Mata Uang Asing
- 6). Buletin Teknis Bagan Perkiraan Standar (Pempus dan Pemda)
- 7). Akualisasi Bultek CTA



*Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud merupakan Bultek SAP yang terbit tahun 2011 yang bertujuan sebagai petunjuk teknis akuntansi atas Aset Tidak Berwujud*

Buletin teknis SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang akan diterbitkan adalah:

- 1). Buletin Teknis Hibah
- 2). Buletin Teknis Kas
- 3). Buletin Teknis Selisih Kurs

### 3. Sosialisasi, *Workshop*, dan *Training of Trainers* SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Kas Menuju Akrual

Pada tahun 2012, KSAP akan mengadakan sosialisasi dan *workshop* mengenai SAP Berbasis Akrual dan buletin teknis baru SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2012, KSAP juga merencanakan mengadakan *Training of Trainers* mengenai SAP Berbasis Akrual.

### 4. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.



*Diskusi Ketua Komite Kerja dan delegasi KSAP dengan Pimpinan State Audit Office of Vietnam*

### 5. Pemeliharaan *Website* KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.



Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs [www.ksap.org](http://www.ksap.org).

## 6. Pemeliharaan *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2012. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ) yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

## 7. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.



*Ketua Komite Kerja KSAP sebagai Narasumber dalam Seminar Akuntansi yang Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Vietnam*

## BAB V

# PENUTUP

Laporan Tahunan 2011 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



*Harmonizing Accounting and Auditing in The Public Sector* yang diselenggarakan di Brussels Belgia tanggal 1 Juli 2011



Sekretariat KSAP :  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat, 10710  
Telp.Fax: 021-3524551  
[www.ksap.org](http://www.ksap.org)